

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kerajaan Mataram berhasil menjadi kerajaan yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap kerajaannya setelah melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Pajang dan menjadikan Sutawijaya memegang penuh atas kekuasaan Kerajaan Mataram. Setelah menjadikan Kerajaan Mataram menjadi kerajaan yang merdeka atas keberhasilan Sutawijaya atau Panembahan Senapati, beliau melakukan langkah-langkah, diantaranya yaitu Sutawijaya melakukan perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram yaitu dari arah utara ke wilayah pantai dan ke timur ke lembah-lembah sungai Sala di Kalimantan Tengah dan Madiun.¹

Setelah Sutawijaya wafat, tahta Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang dengan kurun waktu yang tidak lama setelah Sultan Agung Mataram menduduki kerajaan. Sultan Agung Mataram berhasil membuat Kerajaan Mataram berada di puncak kejayaan yang tidak hanya didapat dengan melakukan ekspansi perluasan daerah kekuasaan ke berbagai daerah namun juga diperkuat dengan perkembangan kebudayaan. Sultan Agung dikenal dengan raja terbesar sepanjang sejarah

¹ Rizal Zamzami. Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584-1601. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. 2 No. 2 (2018) hlm. 156

Kerajaan Mataram karena ia bertekad sebagai raja-raja di Jawa dalam menentang kekuasaan VOC di tanah Jawa.²

Kerajaan Mataram selama berada dalam kekuasaan Sultan Agung mengalami perluasan wilayah kekuasaan. Praktek politik ekspansi yang dijalankan Sultan Agung Mataram adalah mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Kekuasaan raja dari Kerajaan Mataram pada dasarnya bersifat absolut, dimana Raja Mataram merupakan pembuat undang-undang sekaligus pelaksana undang-undang, dan juga sebagai hakim. *Wenang wisesa ing sanagari* yang artinya berwenang tertinggi di seluruh negeri. Kesejahteraan rakyat, kepemimpinan yang adil dan makmur dapat dilihat dari bagaimana kekuasaan seorang raja berkuasa dalam pandangan Jawa-Mataram. Kekuasaan raja sangat besar namun keseluruhan kekuasaannya itu harus difokuskan bagi seluruh kepentingan masyarakat.³

Sementara itu di Kerajaan Cirebon sepeninggal dari Fadhillah Khan, kekuasaan atas Kerajaan Cirebon diambil alih oleh Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu I. Panembahan Ratu I memimpin Kerajaan Cirebon sejak tahun 1570-1649 M. Selama 79 tahun kepemimpinan Panembahan Ratu I, kondisi Cirebon saat itu sangat kondusif, tidak terjadi masalah apapun. Kerajaan Sunda sudah tidak menjadi ancaman lagi bagi eksistensi Kerajaan Cirebon. Sama halnya dengan Kesultanan

² Andriana Nafelian, Sri Handayani, dkk, *Politik Ekspansi Raja Sultan Agung (1613-1645.)* Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015. hal. 4

³ *Ibid.*, hal. 6

Banten, Banten masih tetap menganggap Cirebon sebagai sumber utama eksistensi Kesultanan Banten. Hubungan dengan Kerajaan Pajang pun berjalan tanpa adanya masalah. Pelabuhan-pelabuhan yang menjadi aset Kerajaan Cirebon yang menjadi tempat transaksi masyarakatnya terjaga keamanannya sehingga kapal-kapal pedagang asing singgah.⁴

Pada masa Panembahan Ratu I, Kerajaan Cirebon berada di antara dua kerajaan besar yaitu Kesultanan Banten di barat dan Kerajaan Mataram di timur yang menyebabkan Kerajaan Cirebon tidak bisa memperluas lagi wilayah kekuasaannya. Pada posisi tersebut, kerajaan Cirebon sangat mungkin diruntuhkan oleh kedua kerajaan tersebut, baik oleh Kesultanan Banten maupun Kerajaan Mataram. Namun, Kesultanan Banten masih menghormati Kerajaan Cirebon, karena Kerajaan Cirebon merupakan tahta leluhurnya yaitu Sunan Gunung Jati, sedangkan Kerajaan Mataram menganggap Kerajaan Cirebon sebagai guru dan keramat,⁵ yang mana dahulu pernah terjalin hubungan persahabatan antara Panembahan Senopati karena menganggap Panembahan Ratu I sebagai gurunya.

Bukti kedekatan Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Mataram diantaranya yaitu terdapatnya bangunan Siti Inggil di Keraton Cirebon pada tahun 1625 yang kemudian ditiru oleh Susuhunan untuk keratonnya; pembangunan makam keramat Sunan Gunung Jati yang dijadikan contoh untuk makam Kerajaan Mataram di

⁴ Heru Erwantoro. Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon. *Patanjala* Vol. 4, No. 1, Mei (Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012). hlm. 177

⁵ *Ibid.*,

Wonogiri; Panembahan Ratu diundang dalam Sidang Raya Kerajaan Mataram yang diadakan pada tahun 1636, yang mana dalam Sidang Raya tersebut bermaksud memperbesar kewibawaan Susuhunan⁶; serta pernikahan kakak perempuan Panembahan Ratu I yaitu Putri Ratu Ayu Sakluh dengan Sultan Agung Mataram, yang mana dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putra yaitu Sultan Amangkurat I.⁷

Selain terjalin hubungan persahabatan, terdapat konflik antara kedua kerajaan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram yang dipicu karena penahanan Panembahan Ratu II beserta kedua anaknya di Kerajaan Mataram karena ia gagal menjalankan perintah dari Sunan Amangkurat I yaitu meyakinkan Banten untuk tunduk pada Kerajaan Mataram⁸. Karena mendapati kalau kedua pangeran masih berada di Mataram setelah meninggalnya Panembahan Ratu II di Mataram Sultan Ageng Tirtayasa meminta bantuan kepada Trunajaya dengan memberinya bantuan seperti perbekalan perang untuk memunjang Trunajaya dalam penyerangannya melawan Kerajaan Mataram dengan tujuan meminta kepada Trunajaya untuk membebaskan dua pangeran yang berada di Mataram yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya untuk dibawa ke Banten. Berkat perundingan antara Banten dan Belanda, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya berhasil dinobatkan menjadi sultan

⁶ *ibid.*,

⁷ *ibid.*,

⁸ Heru Erwanto, *Op.Cit.* hlm. 178

oleh Banten dan Belanda dan terbebas dari pengaruh Kerajaan Mataram.

Informasi mengenai penahan yang terjadi pada Panembahan Ratu II dan juga kedua anaknya tersebut tertulis pada naskah kuno berjudul *Carub Kandha Carang Satus*. Naskah *Carub Kandha Carang Satus* disingkat menjadi CKCS merupakan salah satu koleksi naskah kuno Dispusip (Dinas Perpustakaan dan Kerasipan). Naskah CKCS ditulis menggunakan aksara Pegon dan berbahasa Jawa Cirebon. Naskah setebal 943 halaman, teksnya berbentuk macapat atau puisi. Naskah ditulis pada kertas yang berjenis kertas Eropa. Naskah CKCS ini disalin sejak 15 Rajab tahun 1346 H sampai 1347 H (1928-1929 M) oleh Haji Muhammad Shafiyuddin. Haji Muhammad Shafiyuddin merupakan seorang penghulu di Keraton Kasepuhan pada masa Sultan Raja Ningrat.

Salah satu kejadian konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram yang ada di dalam naskah CKCS yaitu sebagai berikut yang terdapat pada halaman 822.

<i>Carang sangang puluh ing</i>	Bagian kesembilan puluh dari
<i>Panging carub kandha</i>	Carub Kandha
<i>Anyarita kalaning</i>	Menceritakan tatkala
<i>Carbon sebanira</i>	Cirebon seba
<i>Naban tahun ming ngetan</i>	Pada setiap tahun ke timur
<i>Sunan Mataram wus manci</i>	Sunan Mataram telah menduga
<i>Yen Carbon ora</i>	Bahwa Cirebon telah tidak
<i>Basaja enggone ngabdi</i>	Jujur lagi dalam pengabdianya

<i>Tandhane wong kene kang</i>	Sebagai bukti, orang Mataram
<i>pada cacad</i>	yang telah diduga berbuat salah
<i>Ming Carbon den imponi</i>	Malah dihimpun oleh Cirebon

*Den go mantu pisan
Lawan maninge teka
Gegere wong dalem puri*

*Katekan gedhang
Pada ilang kang isi*

Bahkan diangkat jadi menantu
Dan lagi ada kejadian
Di dalam pura membuat
keributan
Kedatangan pisang
Tanpa ada isi

Dalam teks tersebut dapat kita lihat bahwa Sunan Mataram pada saat itu curiga terhadap Kerajaan Cirebon yang dianggap tidak patuh lagi dalam pengabdianya terhadap Kerajaan Mataram, yaitu dengan dihimpunnya orang-orang dari Kerajaan Mataram oleh Kerajaan Cirebon yang mana orang-orang tersebut diduga telah membuat suatu kesalahan di Mataram.⁹ Masih banyak informasi mengenai kejadian konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram yang ada di dalam naskah CKCS. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang penulis ramu dalam judul “Konfrontasi Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada Naskah Kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana awal hubungan politik antara Cirebon dengan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681?

⁹Muhamad Mukhtar Zaedin, Ki Tarka Sutarajardja. *Haji Muhammad Shafiyuddin Sajarah Carub Kandha Naskah Pulosaren*. Edisi 1, Cetakan 1. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 567

2. Bagaimana terjadinya konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681?
3. Bagaimana akhir konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana awal hubungan politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681
2. Untuk menjelaskan bagaimana terjadinya konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681
3. Untuk menjelaskan bagaimana akhir konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* tahun 1649-1681

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian tentang konfrontasi Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus* ini, penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka pada naskah, buku, karya-karya ilmiah lainnya yang memaparkan tentang sejarah hubungan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram. Adapun tinjauan pustaka yang akan menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Moh. Rahmat Hidayat yang berjudul "Cirebon dibawah Kekuasaan Mataram Tahun 1613-1705: Kajian Historis Mengenai Hubungan Politik, Sosial dan Agama" yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Skripsi ini berisi tentang sejarah Cirebon ketika di bawah Mataram, mengenai kebijakan-kebijakan Mataram kepada Cirebon. Dijelaskan pula tentang hubungan perkawinan antara Cirebon dengan Mataram yang memiliki fokus pada kajian politik, sosial dan agama. Lalu bagaimana pasang surutnya hubungan Cirebon dengan Mataram hingga dijelaskan pula bagaimana berakhirnya hubungan anatar dua belah pihak kerajaan tersebut, serta pembahasan tentang sejarah bagaimana Cirebon terlepas dari pengaruh Mataram. Namun perbedaan dengan kajian penelitian yang sedang penulis garap yaitu fokus pembahasan hanya dari segi politik saja, dan sumber datanya berasal dari naskah kuno berjudul *Carub Kandha Carang Satus*.
2. Skripsi karya Monica Garstyia Rama Savitri yang berjudul "Pasang Surut Hubungan Kerajaan Mataram Dengan Kerajaan Cirebon Pada Abad Ke XVII (1613-1677)" yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020. Skripsi ini berisi tentang keadaan Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada abad 17. Lalu membahas tentang pasang surutnya hubungan politik antara Kerajaan Cirebon

dan Kerajaan Mataram. Walaupun sama-sama membahas tentang pasang surutnya hubungan politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram, namun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu naskah kuno yang berjudul *Carub Kandha Carang Satus*, sehingga akan didapatkan perbedaan antara fakta sejarah yang ada dengan informasi yang tertulis pada naskah CKCS.

3. Jurnal karya Fika Hidayani dan Am'mar Abdullah Arfan yang berjudul *Ajaran Toleransi pada Naskah Kuno Carub Kandha Carang Satus* yang diterbitkan pada Jurnal Holistik IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020. Jurnal ini berisi penjelasan mengenai ajaran-ajaran toleransi yang ada pada masa lalu yang termuat di dalam naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus*. Artikel jurnal ini menjadi tinjauan pustaka pada penelitian ini karena mengkaji naskah yang sama yaitu naskah kuno CKCS. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Artikel jurnal ini membahas tentang ajaran toleransi yang terdapat pada naskah kuno CKCS, sedangkan penelitian ini membahas tentang hubungan politik yang terdapat pada naskah kuno CKCS.
4. Jurnal karya Agus Iswanto, Nurhatta dan Asep Saefullah yang berjudul *Narasi Moderasi Beragama dalam Naskah Carub Kandha* yang diterbitkan di Jurnal Lektur Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia. Artikel ini membahas tentang 8 poin narasi moderasi beragama yang

terdapat pada naskah kuno *Carub Kandha*. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji. Artikel jurnal ini membahas tentang narasi moderasi beragama yang terdapat pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus*, sedangkan penelitian ini membahas tentang hubungan politik yang terdapat pada naskah kuno *Carub Kandha Carang Satus*.

E. LANDASAN TEORI

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Konflik

Menurut Lewis A Coser bahwa konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan konflik non-realistik adalah bukan konflik yang asalnya dari tujuan-tujuan pihak kedua yang antagonis melainkan dari kebutuhan untuk meredakan konflik yang setidaknya berasal dari salah satu pihak. Masyarakat yang masih buta huruf, biasanya mereka menggunakan cara membalas dendam dengan menggunakan ilmu gaib seperti teluh, santet, dan lain sebagainya. Sebagaimanahalnya pada masyarakat maju yang menggunakan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidak

mampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.¹⁰

2. Teori Politik

Menurut Deliar Noer, bahwa politik merupakan segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa politik dalam hal ini dapat dimengerti bahwa hakikat politik adalah menyatakan bahwa perilaku dan tingkah laku manusia, baik kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang bermaksud untuk mempengaruhi atau mempertahankan aturan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Dapat dimengerti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijakan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

3. Naskah Kuno

Naskah kuno merupakan sumber autentik dari masa lalu yang dapat dijadikan sebagai sumber primer.¹² Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan

¹⁰ M. Wahid Nur Tualeka. Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1 (2017). hlm. 38

¹¹ Abdulkadir B. Nambo, Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Jurnal Volume XXI No. 2 April-Juni 2005*. hlm. 265

¹² Oman Fathurahman, *Filologi dan Islam Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010). hlm. 3

Naskah Kuno Pasal 1 yang berbunyi: Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.¹³

Nabilah Lubis menambahkan bahwa naskah kuno yang keberadaannya tersebar di seluruh negeri menyimpan banyak sekali informasi yang bermanfaat yang mana apabila kita telaah menggunakan pendekatan filologi, maka hasilnya dapat digunakan dan berguna bagi ilmu-ilmu lainnya seperti sejarah, hukum (terutama hukum adat), kebahasaan, perkembangan agama, kebudayaan, yang mana akan jadi sangat bermanfaat dan dapat dipublikasikan untuk masyarakat luas.¹⁴

Naskah kuno merupakan objek kajian penelitian dari ilmu Filologi, yang mana filologi merupakan cabang ilmu humaniora yang berfokus pada aspek bahasa dan sastra khususnya yang termasuk dalam golongan bahasa dan sastra klasik. Kajian filologi yang menjadi aspek dalam bahasa dan sastra sangat luas, yang di dalamnya menjangkau tata bahasa, retorika, penafsiran pengarang, kritik teks, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal di atas Siti Baroroh Baried mendefinisikan filologi secara umum sebagai

¹³ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno Pasal 1. hal. 2 <https://jdih.perpusnas.go.id> diakses pada 16 Maret 2022 pukul 4.15 WIB

¹⁴ Nabilah Lubis. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007). hlm. 27

“ilmu yang mempelajari kebudayaan suatu bangsa berdasarkan bahasa dan kesusastraannya”.¹⁵

Trie Utari menambahkan bahwa ilmu filologi dengan kegiatan pelestarian dan pengerjaan terhadap naskah kuno, maka nilai-nilai yang terdapat pada naskah tersebut akan diketahui terutama dengan mengungkap sejarah bangsa. Oleh karenanya akan bangkit kembali karakter dan akan terbaca pula masa depan suatu bangsa.¹⁶ Oleh karena itu dengan mempelajari ilmu filologi, maka nilai-nilai yang akan didapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi masa kini dan masa yang akan datang.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian jenis kualitatif yang mana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian¹⁷ dan menggunakan kajian pustaka sebagai pendekatannya dengan menggunakan penelitian lapangan, studi dokumen, menggunakan sumber karya-karya ilmiah seperti beberapa jurnal yang penulis temukan di jurnal-jurnal online di internet, juga buku yang mana sumber-sumber tersebut

¹⁵ Oman Fathurahman, *Op.Cit.* hlm. 10

¹⁶ Trie Utari Dewi, Pembelajaran Filologi Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mengungkap dan Mengungkap Karakter Suatu Bangsa. *Kaganga*, Vol. 1, Nomor 1 (2018). hlm. 53

¹⁷ Pupu Saeful Rahmat. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, Vol.5, No.9 (2009). hal. 1-8

merupakan sumber yang mumpuni untuk dijadikan sebagai rujukan. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan sejarawan yang mumpuni dalam pembahasan yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah langkah-langkah penelitian yang digunakan:

1. Heuristik

Heuristik adalah teknik atau cara-cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan (jika memungkinkan), melalui interview untuk sejarah kontemporer.¹⁸ Umi Narimawati mendefinisikan sumber data primer sebagai berikut sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sedangkan Sugiyono mendefinisikan sumber data sekunder sebagai berikut sumber data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.¹⁹

¹⁸ Alian, Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian. *Jurnal Criksetra* Vol.2 No.2, (2012)

¹⁹Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, No.2, (2017). hlm. 212

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data.²⁰ Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan yaitu naskah kuno berjudul *Sajarah Carub Kandha Carang Satus Naskah Pulosaren*. Nama pengarang dari naskah ini tidak diketahui. Tapi, mungkin yang menulis naskah ini adalah orang tuanya atau leluhurnya penyalin naskah ini, yaitu K.H. Muhammad Safiyuddin, yang menjadi Pengulu Sultan Sepuh. Tahun penulisan disebutkan pada waktu Duha pada hari Ahad (Minggu) tanggal 15 Safar Tahun Jim Awa, 1261 Hijriyah (1845 M | 1773 AJ).

Adapun nama penyalin adalah Kiyahi Haji Muhammad Shafiyuddin (wafat 1961) putra Kiyahi Sahal Pangulu Sultan Sepuh. Menurut Noerdin M. Noer, kakeknya ini, Haji Muhammad Shafiyuddin, dahulu adalah seorang Pengulu Keraton Kasepuhan pada masa Sultan Raja-rajaningrat (Noerdin: 29|08|2016).

Penyalinan naskah ini dimulai pada hari Ahad (Minggu) Kliwon pukul 4 (16:00) tanggal 15 bulan Rajab tahun Jim Akhir, tahun 1346 Hiriyah (hari Minggu tanggal 8 Januari 1928 M). Selesai penyalinan pada tahun 1346-1347 H (1928-1929 M | 1858-1859 AJ).

²⁰ Diding Bajuri, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol.VI No.1 , (2013). hlm. 158

Naskah ini disimpan di Bapusipda Kota Cirebon atau Dispusip Kota Cirebon. Naskah berasal dari Nurdin M. Noer dan pemiliknya adalah Bapusipda atau Dispusip Kota Cirebon.

Jenis Alas Naskah berupa Kertas Eropa. Kondisi fisik naskah masih sangat baik, walaupun ada beberapa halaman yang sudah lepas penjilidan dan naskah ini sudah dipreservasi menggunakan sampul karton warna biru. Ada beberapa bagian halaman awal dan akhir berupa foto copian. Penjilidan dilakukan dengan cara dijahit benang, bersampul karton warna biru. Garis panduan teks menggunakan tinta hitam dengan tiga garis yang agak tebal. Jumlah kuras dan lembar kertas berisi 20 kuras dengan masing-masing kuras berisi 46 lembar. Penomoran halaman berada di bagian atas menggunakan angka Arab. Akan tetapi tidak semua halaman diberi penomoran, hanya bagian awal saja (asli). Dan juga ada penomoran di bagian bawah menggunakan angka latin (baru). Penomoran yang asli (Arab) dan yang baru (Latin), sama-sama kacau karena tidak sesuai dengan fakta halaman yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena tebalnya naskah sehingga pemberian nomor halaman secara manual dapat membingungkan. Jumlah halaman sebanyak 943 halaman. Penomoran halaman dimulai dari halaman dua dan tidak ada halaman kosong. Jumlah baris dalam setiap halaman berisi 15 baris teks. Ukuran naskah dalam cm (p x l) sebesar 35 x 21 cm. Ukuran teks dalam cm (p x l) sebesar 28 x 15 cm.

Di samping menggunakan penomoran halaman, naskah ini juga menggunakan kata alihan yang berfungsi untuk mengikat halaman yang sesudahnya. Huruf dan bahasa menggunakan huruf

Pegon dengan bahasa Jawa Cirebon. Jenis tulisan cenderung Naskhi dengan warna bertinta hitam dan merah. Tinta merah digunakan untuk menandai rubrikasi baru.

Bentuk karangan teks berupa tembang Macapat atau bergenre puisi. Teks dibuka dengan pupuh Kasmarandana dan diakhiri dengan pupuh Kinanti. Jenis pupuh atau nama tembang yang digunakan terdiri dari 12 macam tembang. Pertama, pupuh Kasmarandana diulang sebanyak 10 kali dengan penyebutan yang berbeda, seperti Kasmarandana, Kasmaran, Asmarandana, dan Samarandana. Kedua, pupuh Dangdanggula diulang sebanyak 9 kali. Ketiga, pupuh Sinom diulang sebanyak 9 kali. Keempat, pupuh Kinanthi diulang sebanyak 10 kali. Kelima, pupuh Pangkur diulang sebanyak 9 kali. Keenam, pupuh Pamijil diulang sebanyak 9 kali dengan penyebutan pupuh Mijil sekali. Ketujuh, Durma diulang sebanyak 8 kali. Kedelapan, pupuh Magateru diulang sebanyak 8 kali dengan penyebutan Magatruh, dengan huruf *h* sekali. Kesembilan, pupuh Ladrang diulang sebanyak 8 kali. Kesepuluh, pupuh Pucung diulang sebanyak 8 kali. Kesebelas, pupuh Perlambang diulang sebanyak 8 kali. Dan terakhir, keduabelas, pupuh Sumekar diulang sebanyak 8 kali.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber atau data-data yang dapat memperkuat data primer. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.²¹ Sumber sekunder yaitu suntingan naskah

²¹ *ibid.*,

Carub Kandha Carang Satus yang ditulis oleh Haji Muhammad Shafiyuddin dan dialih bahasakan oleh Muhamad Mukhtar Zaedin dan Ki Tarka Sutaraharja diterbitkan oleh penerbit Deepublish pada tahun 2017.

2. Kritik

Kritik merupakan tahap kedua dari metodologi penulisan sejarah yang mana sumber yang telah ditemukan melalui tahapan heuristic itu harus diuji dahulu dengan kritik ekstern dan kritik intern. Jika diterapkan terhadap sumber lisan, otentisitas berarti pelaku atau saksi. Kritik intern meliputi masalah kredibilitas yaitu masalah dapat tidaknya dipercaya sumber itu.²² Dalam tahap ini penulis memilah sumber dengan mengkritik informasi yang ada di dalam naskah CKCS dengan membandingkan fakta-faktasejarah yang ada.

3. Interpretasi

Setelah melalui kritik maka lahirlah fakta. Suatu fakta yang dibiarkan berdiri mandiri atau sejumlah fakta yang disusun berurut sekalipun secara kronologis, belumlah merupakan kisah sejarah. Antara fakta dan kisah sejarah ada suatu tahapan yang harus ditempuh yaitu tahap aninterpretasi. Penulisan sejarah lebih merupakan masalah interpretasi atau penafsiran masa lampau dari pada usaha menghidupkan kembali atau menciptakannya, maka jelaslah bahwa penafsiran yang dibuat, jenis perspektif yang

²² Nina Herlina. *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika edisi revisi, 2020). hlm. 118

dipilih, dan tujuan yang terdapat di balik pemikiran dan penulisan itu sangat penting.²³

4. Historiografi

Secara teoritis, historiografi mempunyai dua makna pertama penulisan sejarah (*historical writting*), kedua sejarah penulisan sejarah (*historical of historical writting*). Dalam metode sejarah, historiografi merupakan tahap akhir dan sebagai tinjauan atas hasil karya tulis sejarah. Dalam pengertian yang kedua, kita dapat melihat bagaimana perkembangan penulisansejarah di Indonesia.²⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan yang mana di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi awal hubungan politik antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada tahun 1649-1681.

Bab III berisi tentang terjadinya konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada tahun 1649-1681.

²³*Ibid.*

²⁴Nurhayati, Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21, Vol.1 No.1 Jan-Des, 2016. hal. 257

Bab IV berisi akhir konfrontasi antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram pada tahun 1649-1681.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, serta saran dari penulis mengenai hasil penelitian.

